

Pengaruh Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD pada Pemerintah Kabupaten Luwu

Irmawati Alimuddin

Prodi Akuntansi Perpajakan, Jurusan Ekonomi Bisni Politeknik

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk menguji dan menganalisa pengaruh Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD. Populasi penelitian ini adalah seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Luwu. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang di antar lang sung oleh penulis Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan analisa regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan pengujian kualitas data dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Struktur Desentralisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Manajerial SKPD.

Kata Kunci: *Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Struktur Desentralisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Manajerial SKPD.*

Abstract

This research was conducted with the aim to examine and analyze the influence of Budget Scheduling, Budget Goal Clarity, Decentralized structure on Managerial performance in Luwu Regency, Population of this research is all organization in Luwu regency. The data collecting had been done with a questionnaire distributed directly by the researcher. Before testing the hypothesis with multiple regression analysis, testing of quality data was being done first. The analysis shows that the results of this study indicate that the accuracy of the influence of Budget Scheduling, Budget Goal Clarity, Decentralized structure on Managerial Performance have a positive and significant effect on SKPD Managerial Performance.

Keywords: *Budget Scheduling, Budget Goal Clarity, Decentralized structure, Participatory, Managerial Performance*

Copyright (c) 2022 Irmawati Alimuddin

✉ Corresponding author :

Email Address : irmayurez@gmail.com

PENDAHULUAN

Ada beberapa faktor yang diduga penyebab kinerja pemerintah daerah rendah diantaranya karena system pengelolaan keuangan daerah yang masih lemah dimulai dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD, pelaksanaan/penatausahaan APBD, pertanggungjawaban yang berupa pelaporan hasil pelaksanaan APBD dan pengawasan. Dalam proses penganggaran, pemerintah daerah selalu mengalami keterlambatan di dalam

pengesahan perda APBD. Keterlambatan ini menyebabkan banyak program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan untuk tahun anggaran berjalan sehingga terjadi keterlambatan pembangunan daerah tersebut.

Dalam pelaksanaan dan penatausahaan APBD satuan kerja perangkat kerja masih mengalami kendala, misalkan dalam pemahaman mereka dalam pembuatan dokumen dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan APBD. Misalkan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dokumen pelengkap lainnya. Kendala ini disebabkan tingkat pemahaman staf yang terlibat atas peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah masih rendah.

Hampir di semua aspek pengelolaan keuangan daerah, satuan kerja perangkat daerah memiliki kelemahan sehingga dapat dikatakan kinerja satuan kerja perangkat daerah masih rendah. Di satu sisi, semakin meningkat tekanan dari masyarakat agar pemerintah daerah meningkatkan kinerja dan akuntabilitas demi terwujudnya good governance menyebabkan pemerintah daerah harus membenahi diri untuk merespon perubahan yang diinginkan oleh masyarakat sebagai stakeholder. Satuan kerja perangkat daerah diharapkan memiliki kinerja yang baik yaitu dengan memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Isu yang mendapat perhatian publik dalam sektor pemerintahan daerah belakangan ini tentang anggaran. Terdapat perbedaan yang mendasar dalam penetapan APBD antara sebelum dan sesudah otonomi daerah yaitu dalam struktur sentralisasi, penetapan APBD didasarkan pada keputusan pihak-pihak tertentu (Kepala Daerah dan Sekertaris Daerah), masing-masing satuan kerja perangkat kerja (SKPD) kurang berperan dalam proses penyusunan anggaran.

Anggaran menjadi sangat penting dan relevan di pemerintah daerah, karena anggaran berdampak terhadap kinerja pemerintah yang dikaitkan dengan fungsi pemerintah dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Anggaran merupakan alat untuk mencegah informasi asimetri dan perilaku disfungsi dari pemerintah daerah (Yuhertina, 2003) serta merupakan proses akuntabilitas public (Bastian 2001). Disamping itu, anggaran merupakan dokumen/kontrak politik antara pemerintah dan DPRD untuk masa yang akan datang (Mardiasmo, 2002). Selanjutnya DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan *agency theory*, dimana pemerintah sebagai *agent* dan DPRD sebagai *principal*. Fungsi pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah bersifat pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan teknis.

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah, Gubernur dan Bupati/Walikota adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan. Di samping pengawasan tersebut pengawasan oleh masyarakat (social kontrol) diperlukan dalam mewujudkan peran serta masyarakat guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pada konteks pemerintah daerah, isu kejelasan sasaran anggaran juga tercakup dalam Rencana Strategi Daerah (Renstrada) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda). Sehingga dengan adanya kejelasan sasaran anggaran yang jelas, aparat pelaksana anggaran juga akan terbantu dalam perealisasiannya, secara langsung ini akan mempengaruhi terhadap kinerja aparat. Salah satu penyebab tidak efektif dan efisiennya anggaran dikarenakan ketidakjelasan sasaran anggaran yang mengakibatkan aparat pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam penyusunan target-target anggaran. Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada pimpinan, untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Pimpinan akan memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara tepat. Sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan SKPD untuk menyusun target anggaran. Selanjutnya target-target anggaran yang disusun akan

sesuai dengan sasaran yang akan dicapai pemerintah daerah. Oleh karena itu, kinerja sendiri merupakan hasil akhir (output) organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi.

Desentralisasi menunjukkan tingkat otonomi yang didelegasikan pada SKPD sehingga SKPD mempunyai tanggung jawab yang lebih besar terhadap perencanaan dan pengendalian aktivitas operasi serta membutuhkan informasi yang lebih banyak. Jadi organisasi yang lebih terdesentralisasi seperti pelaksanaan otonomi di Indonesia, maka SKPD mempunyai otonomi yang lebih besar dalam proses pengambilan atau penetapan keputusan. Menurut Wahyudin (2010), desentralisasi adalah seberapa jauh manajer yang lebih tinggi mengizinkan manajer dibawahnya untuk mengambil keputusan secara independen.

Sehingga proses penganggaran pemerintah daerah selalu mengalami keterlambatan dalam pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena adanya tarik ulur dalam pembahasan anggaran. Keterlambatan ini menyebabkan banyak program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan untuk tahun anggaran berjalan dilaksanakan tepat waktu, APBD disahkan pada bulan Desember tahun sebelumnya, tapi dana sering kali lambat tersedia. Bukan hal yang aneh, walau tahun anggaran mulai per 1 Januari tapi sampai bulan Mei pun anggaran program ditingkat SKPD masih sulit didapatkan, sehingga kinerja pemerintah daerah tidak maksimal.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial, yaitu: Syafriah (2009) dan Mila Suhardini, Kamaliah, M. Rasuli (2014) bahwa terdapat tingkat signifikansi yang berbeda dari masing-masing variabel atribut kinerja manajerial.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas dan permasalahan-permasalahan tentang kondisi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah sebagai penyelenggara pembangunan di daerah dalam upaya meningkatkan kinerja agar pembangunan efektif, efisien dan tepat sasaran dalam pelaksanaannya maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai hal tersebut di atas yaitu dengan judul "Pengaruh Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu)".

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD di Pemerintahan Kabupaten Luwu ?
2. Untuk menganalisis pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD di Pemerintahan Kabupaten Luwu ?
3. Untuk menganalisis pengaruh Struktur Desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD di Pemerintahan Kabupaten Luwu ?

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini juga menggunakan penelitian penjelasan yakni kausalitas menjelaskan suatu hubungan antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis (Ghozali, 2011). Jenis penelitian ini dipilih mengingat tujuan yang hendak dicapai mencakup usaha-usaha untuk menjelaskan hubungan dan pengaruh yang terjadi antara kuesioner sebagai alat pengumpul data primer.

Jenis penelitian ini menganalisis data-data dan fakta yang diperlukan untuk mendukung pembahasan penelitian dalam menjawab pokok-pokok permasalahan yang diajukan yaitu menganalisis pengaruh skedul penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran struktur desentralisasi dan kinerja manajerial SKPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada pemerintah Kabupaten Luwu. Lokasi ini dipilih atas pertimbangan dapat memberikan informasi yang jelas tentang pengaruh skedul penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran struktur desentralisasi dan kinerja manajerial. Selanjutnya penelitian ini akan dilaksanakan selama dua bulan, mulai dari bulan September 2017 sampai Maret 2018

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yaitu pejabat yang memiliki wewenang dalam penyusunan anggaran, kepala bagian anggaran, kepala seksi selaku reviewer laporan keuangan dan staf bagian anggaran pada Kantor Satuan Kerja Perangkat Kerja (SKPD) di Kabupaten Luwu
- b) Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui referensi atau literatur-literatur, dokumen-dokumen serta website resmi yang berkaitan dengan penelitian sistem akuntansi keuangan daerah, teknologi informasi dan sistem pengendalian intern.

2. Sumber Data

Sumber data diperoleh melalui lembaga resmi pemerintah yaitu Kantor Satuan Kerja Perangkat Kerja (SKPD) di Kabupaten Luwu

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Luwu dengan jumlah 57 (lima puluh tujuh) SKPD yang terdiri dari Sekretariat daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat, 25 (dua puluh lima) Dinas, 6 (enam) Badan, Rumah Sakit, serta 22 (dua puluh dua) Kecamatan.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang ditetapkan atau ditentukan dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu (Sugiyono, 2013). Sampel penelitian ini adalah 34 SKPD yang terkait penyusunan anggaran di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Luwu. Setiap SKPD terdapat 2 responden yang menjadi sampel yaitu Kepala SKPD dan Bendahara SKPD sehingga total responden adalah sebanyak 68 orang (dari 34 SKPD).

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda, yaitu metode analisis untuk lebih dari satu variabel independen. Penelitian ini menggunakan program pengolahan data yaitu SPSS

Untuk mengolah data hasil penelitian maka peneliti menggunakan metode analisis sebagai berikut:

(i) Metode Deskriptif

Statistik deskriptif ini bertujuan untuk menguraikan secara deskriptif karakteristik responden dan variabel-variabel penelitian melalui distribusi frekuensi, rata-rata dan persentase.

(ii) Metode Regresi Berganda

Uji regresi ini digunakan untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen (Ghozali, 2006). Persamaan regresi yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kinerja Manajerial SKPD

α = Konstanta (*Intercept*)

$b_1 - b_3$ = Parameter

X_1 = Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran

X_2 = Kejelasan Sasaran Anggaran

X3 = Struktur Desentralisasi
e = Faktor kesalahan (*Error random*)

Pengujian hipotesis ini digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel bebas. Perhitungan hipotesis statistik disebut signifikan secara statistik apabila H_0 ditolak, sebaliknya disebut tidak signifikan apabila hasil uji statistiknya menunjukkan H_0 diterima (Ghozali, 2006). Untuk mengukur fungsi regresi sampel apakah telah tepat secara statistik dapat diukur dari besarnya nilai koefisien determinan, nilai statistik F dan nilai statistik t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Hasil Uji R^2

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.811 ^a	.657	.638	1.29580

a. Predictors: (Constant), StrukturDesentralisasi, KejelasanSasaran, SkedulPenyusunanAnggaran

b. Dependent Variable: KinerjaManajerial

Tabel.2 Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	170.482	3	56.827	33.844	.000 ^b
	Residual	88.992	53	1.679		
	Total	259.474	56			

a. Dependent Variable: KinerjaManajerial

b. Predictors: (Constant), StrukturDesentralisasi, KejelasanSasaran, SkedulPenyusunanAnggaran

Dari tabel 1 di atas terdapat angka R sebesar 0,811 yang menunjukkan bahwa hubungan antara kinerja manajerial dengan ketiga variabel independennya cukup kuat karena berada di defenisi sangat kuat yang angkanya 0,5. Sedangkan nilai R square sebesar 0,657 atau 65% ini menunjukkan bahwa variabel kinerja manajerial dapat dijelaskan oleh variabel ketepatan skedul penyusunan anggaran , kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi 65% sedangkan sisa nya 35% dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

2. Hasil Uji Simultan (F)

Uji simultan digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas secara menyeluruh terhadap variabel terikat dilakukan dengan menggunakan uji F. Uji ini menggunakan α 5%. Dengan ketentuan, jika signifikansi < dari 0,05 maka hipotesis yang diajukan dapat diterima.

Tabel 2, menunjukkan bahwa tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa ketepatan skedul penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan struktur desentralisasi secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh terhadap kinerja manajerial dengan probabilitas 0,000 karena probabilitas jauh lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kualitas laporan keuangan

3. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk melihat pengaruh masing - masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan uji t yaitu dengan melihat nilai signifikansi t hitung. Jika nilai signifikansi < dari 0,05 maka dapat dikatakan variabel independen tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 3

Tabel 3. Hasil uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-7.996	3.690		-2.167	.035
1 SkedulPenyusunanAngaran	.535	.088	.519	6.103	.000
KejelasanSasaran	.373	.099	.308	3.763	.000
StrukturDisentralisasi	.530	.113	.399	4.708	.000

a. Dependent Variable: KinerjaManajerial

Berdasarkan tabel 17 di atas, maka persamaan regresi yang terbentuk adalah :

$$Y = -7,996 + 0,535 X_1 + 0,373 X_2 + 0,530 X_3$$

Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta adalah -7,996 ini menunjukkan bahwa, jika variabel independen (X_1 , X_2 , X_3) bernilai nol (0), maka nilai variabel dependen (Y) sebesar -7,996
2. Koefisien regresi skedul penyusunan anggaran (b_1) adalah 0,535 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y mengalami kenaikan sebesar 0,535 yang disebabkan peningkatan nilai variabel X_1 , dan apabila variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel X_1 dengan variabel Y. Semakin baik skedul penyusunan anggaran, maka kinerja manajerial akan semakin meningkat.
3. Koefisien regresi kejelasan sasaran anggaran (b_2) adalah 0,373 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y mengalami kenaikan sebesar 0,373 yang disebabkan peningkatan nilai variabel X_2 dan apabila variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel X_2 dengan variabel Y. Semakin baik kejelasan sasaran anggaran, maka kinerja manajerial akan semakin meningkat.
4. Koefisien regresi struktur desentralisasi (b_3) adalah 0,530 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y mengalami kenaikan sebesar 0,530 yang disebabkan peningkatan

nilai variabel X_3 dan apabila variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel X_3 dengan variabel Y . Semakin tinggi struktur desentralisasi, maka kinerja manajerial akan semakin meningkat.

Melalui statistik uji-t yang terdiri dari ketepatan skedul penyusunan anggaran (X_1), kejelasan sasaran anggaran (X_2), dan struktur desentralisasi (X_3) dapat diketahui secara parsial pengaruhnya terhadap Kinerja Manajerial (Y).

a) Pengujian Hipotesis Pertama (H_1)

Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel ketepatan skedul penyusunan anggaran memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H_1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa skedul penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Nilai t yang bernilai +6,103 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen

b) Pengujian Hipotesis Pertama (H_2)

Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H_1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Nilai t yang bernilai +3,763 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen

c) Pengujian Hipotesis Pertama (H_3)

Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel struktur desentralisasi anggaran memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H_1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa struktur desentralisasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Nilai t yang bernilai +4,708 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan variabel ketepatan skedul penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial pada 34 SKPD di Kabupaten Luwu. Adapun pembahasannya yaitu :

1. Pengaruh ketepatan skedul penyusunan anggaran terhadap Kinerja Manajerial

Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa ketepatan skedul penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial diterima.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh yang positif dan signifikan antara ketepatan skedul penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial. Persamaan regresi punya arah koefisien positif. Pengaruh positif menunjukkan bahwa hubungan ketepatan skedul penyusunan anggaran dan kinerja manajerial adalah searah. Berdasarkan teori agensi, pihak *principal* melakukan pengawasan anggaran yang baik dengan pihak agen dimana jika ketepatan skedul penyusunan anggaran semakin tinggi, maka kinerja manajerial juga semakin tinggi.

Di samping itu, dalam proses penyusunan dan perubahan anggaran daerah ada dua perspektif yang dapat ditelaah dalam aplikasi teori keagenan, yaitu hubungan antara eksekutif dengan legislatif. Sebelum penyusunan APBD dilakukan, terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang arah dan kebijakan umum serta prioritas anggaran, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD. Eksekutif membuat rancangan APBD yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah (perda). Dalam perspektif keagenan hal ini merupakan bentuk kontrak (*incomplete contract*) yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

Dalam fungsinya sebagai alat pengendalian, anggaran digunakan sebagai suatu sistem untuk mengukur kinerja suatu organisasi. Dengan ketepatan skedul penyusunan

anggaran tepat waktu, maka semakin cepat dalam proses pengambilan keputusan.

Sebagai contoh, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka SKPD telah menyampaikan usulan program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya ke Bappeda pada bulan April dan menyampaikan RKA-SKPD ke DPKKD pada bulan Agustus. Dalam sebuah anggaran daerah harus mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu untuk kepentingan masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat, dalam format yang akomodatif dalam kaitannya dengan pengawasan anggaran. Oleh karena itu, dalam kinerja manajerial dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan kegiatan harus dilaksanakan secara teknis maupun ekonomis kepada pihak legislative, masyarakat maupun pihak-pihak yang bersifat independen yang memerlukan (Yanti, 2013).

Berdasarkan analisa tersebut, maka dapat dikatakan bahwa variabel ketepatan skedul penyusunan anggaran sangat penting dalam peningkatan kinerja manajerial SKPD pada pemerintahan kabupaten luwu. Secara empiris hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nadirsyah & Putra (2012), yang menunjukkan bahwa ketepatan skedul penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial tapi bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Syafrial (2009) yang menunjukkan bahwa ketepatan skedul penyusunan anggaran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja manajerial. Persamaan regresi punya arah koefisien positif. Pengaruh positif menunjukkan bahwa hubungan kejelasan sasaran anggaran dan kinerja manajerial adalah searah. Berdasarkan agensi teori, pihak agen menerapkan kejelasan sasaran anggaran dengan jelas dan spesifik kepada pihak principal sehingga kejelasan sasaran anggaran semakin tinggi, maka kinerja manajerial juga semakin tinggi. Berdasarkan hasil analisis regresi linier ganda, maka dapat diambil suatu justifikasi bahwa terdapat pengaruh yang signifikan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial.

2. Pengaruh Stuktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial

Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial diterima.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh yang positif dan signifikan antara kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial. Persamaan regresi punya arah koefisien positif. Pengaruh positif menunjukkan bahwa hubungan kejelasan sasaran anggaran dan kinerja manajerial adalah searah. Berdasarkan agensi teori, pihak agen menerapkan kejelasan sasaran anggaran dengan jelas dan spesifik kepada pihak principal sehingga kejelasan sasaran anggaran semakin tinggi, maka kinerja manajerial juga semakin tinggi. Berdasarkan hasil analisis regresi linier ganda, maka dapat diambil suatu justifikasi bahwa terdapat pengaruh yang signifikan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial.

Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini menegaskan bahwa dengan adanya kejelasan sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah suatu organisasi untuk bertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sehingga berimplikasi pada peningkatan kinerja.

Berdasarkan analisa tersebut maka dapat dinyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan faktor penting dalam kinerja manajerial SKPD sehingga perlu lagi ditingkatkan transparan kejelasan sasaran anggaran

Secara empiris hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra (2013), yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif

dan signifikan terhadap kinerja manajerial.

3. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial

Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial diterima.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh yang positif dan signifikan antara struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial. Persamaan regresi punya arah koefisien positif. Pengaruh positif menunjukkan bahwa struktur desentralisasi dan kinerja manajerial adalah searah.

Jika struktur desentralisasi semakin tinggi, maka kinerja manajerial juga semakin tinggi. Hal ini berarti struktur desentralisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD. Sehingga hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bangun (2009) dan Pratiwy (2013), bahwa struktur desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Dalam hubungan keagenan, terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni yang memberikan kewenangan atau kekuasaan (disebut prinsipal) dan yang menerima kewenangan (disebut agen). Dalam hal struktur desentralisasi merupakan faktor penting dalam menunjukkan tingkat ekonomi yang didelegasikan pada manajerial SKPD sehingga mempunyai tanggungjawab yang lebih besar terhadap perencanaan dan pengendalian segala aktivitas yang akan meningkatkan independensi SKPD dalam bertindak dan berfikir dalam suatu tim tanpa mengorbankan keputusan dalam suatu organisasi. Dengan kata lain, semakin baik struktur terdesentralisasi organisasi dipemerintah daerah.

SIMPULAN

Ketepatan skedul penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD di Pemerintahan Kabupaten Luwu. Semakin tinggi ketepatan skedul penyusunan anggaran maka kinerja manajerial akan semakin tinggi pula. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD di Pemerintahan Kabupaten Luwu. Semakin baik Kejelasan sasaran anggaran maka kinerja manajerial akan semakin baik pula. Struktur desentralisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD di Pemerintahan Kabupaten Luwu. Semakin baik Struktur desentralisasi maka kinerja manajerial akan semakin baik pula.

Referensi :

- Bangun, A., 2009. Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal sebagai Variabel Pemoderasi. *Tesis*. Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.
- Bastian, I., 2006. *Audit Sektor Publik : Suatu Pengantar*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- _____, 2007. *Audit Sektor Publik*, Edisi 2, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Coryanata, I., 2011. Penggunaan Teknologi Informasi dan Sistem Akuntansi
- Din, M., 2008. Anteseden dan Konsekwensi Partisipasi Penganggaran (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Pemda Kota Palu), *Tesis*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Emami, M., et.al., 2012. Government Accounting An Assessment of Theory, Purpose and Standards, *Journal of Contemporary Business Research*, Vol. 3 No. 9. June.

- Faguet, JP., 2000. Decentralization and Local Government Performance Improving Public Services Provision in Bolivia, *Colombian Academic Journal*. 3(1) : 127-176.
- Fitri, Meutia dan Z. Basri., 2000. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Motivasi Pencapaian Anggaran Perusahaan Industri Petrokimia Aceh Utara, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol.2 No. 3 : 229-239.
- Ghozali, I., 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi 4, BP. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, I, dan Ratmono, D., 2008. *Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD)*, Edisi 3, BP. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi Kelima. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Hendriksen, M.C., and Breda, M.F., 2005. *Accounting Theory*, 7th Ed. Boston, Richard D. Irwin
- Indudewi, D., 2009. Pengaruh Sasaran Jelas dan Terukur, Insentif, Desentralisasi dan Pengukuran Kinerja terhadap Kinerja Organisasi, *Tesis*. Universitas Diponegoro Semarang
- Indarto, S.L., dan Ayu, S.D., 2011. Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Perusahaan melalui Kecukupan Anggaran, Komitmen Organisasi, Komitmen Tujuan Anggaran, dan Job Relevant Information, *Kajian Ilmiah*, Vol. 14 No. 1, Januari.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*, Artikel I Tahun I No.4 Juni
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rafika, 2010. *Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja SKPD Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- Ramandei, P., 2009. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung), *Tesis*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004. tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2005. tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004. tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Syafrial. (2009). Pengaruh Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial SKPD pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- Wilkinson, 2000. *Sistem Informasi dan Informasi*, Edisi Kedua. Terjemahan oleh Marianus Sinaga. Erlangga: Jakarta.
- Yuhertiana, Indrawati. "Principal-agent theory dalam proses perencanaan anggaran sektor publik. *Kompak: Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Sistem Informasi*, 403-422
- Yuwono, S., Indrajaya, A., Hariadi, 2005. *Penganggaran Sektor Publik-Pedoman Praktis Penyusunan Anggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggung Jawaban APBD (Berbasis Kinerja)*, Penerbit Pemerintahan Kota Dumai dan e- Conos Consulting, Kota Administrasi Kota Dumai, Propinsi Riau.